

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awalnya yaitu 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) pada akhirnya mengumumkan yaitu Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Setelah dikabarkannya berita tersebut lalu diberitakan kepada masyarakat luas, sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2020 di Wuhan, Provinsi Hubei-RRC (China) terjadi merebaknya kejadian COVID-19. Di ketahui ketika memasuki pada minggu ketiga di bulan April 2020 sebanyak 170.000 lebih korban yang meninggal, serta yang pulih terdapat 640.000 dari jumlah yang pasien positif ada lebih dari 1,4 juta orang (www.corona.help.com, Diakses pada 28 Oktober 2020). Pada tanggal 2 Maret 2020 setelah virus Corona di berbagai negara kemudian Pemerintah Indonesia akhirnya mengumumkan adanya kasus COVID-19 pertama di Indonesia, sehingga kejadian ini membuat masyarakat panik sebenarnya ada juga yang menyebutkan bahwa Corona muncul di Indonesia sebelum bulan Maret. (<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> diakses pada 28 Oktober 2021). Pada 25 Oktober 2020, terkonfirmasi terdapat kasus positif COVID-19 yang telah mencapai angka 389.712 dan angka jumlah pasien yang sembuh terdapat 309.219 serta angka kematian sebesar 4.454 jiwa. Banyak sekali yang terkonfirmasi dari hari ke hari kian menambah bukan berkurang. (<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-13870336/update-penularan-corona-di-wilayah-indonesia-per-hari-ini-minggu-25-oktober-2020> diakses pada 3 November 2020).

Pandemi makin Mengkhawatirkan di negara kita ini, pemerintah Indonesia tidak tutup mata melihat fenomena ini lalu pemerintah menerapkan Langkah-langkah seperti menghimbau warga-warga untuk diam berada di rumah. Dengan diam dirumah lebih baik terutama anak kecil yang imunnya rentan terkena virus maka sangat diterapkam himbauan pemerintahan.

Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Akibat hukum dari terbitnya Keputusan Presiden tersebut adalah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menjadi upaya Indonesia untuk menghambat penularan pandemi COVID-19, namun juga mengakibatkan mobilisasi orang, barang dan jasa menjadi sangat terganggu dan bahkan menyebabkan rantai aktivitas perkonomian tertentu harus berhenti, sehingga dengan hal tersebut memperlihatkan adanya pembatasan kebebasan dimasyarakat untuk berkerumun (<https://www.liputan6.com/health/read/4220053/pemerintah-tetapkan-pembatasan-sosial-berskala-besar-di-wilayah-tertentu> diakses pada 3 November 2021). PSBB ini dimaksudkan supaya masyarakat jangan terlalu berkerumun yang di khawatirkan menyebabkan cluster baru dan PSBB ini tentu membuat suatu kemunduran dalam pekerjaan masyarakat terutama dalam beberapa sektor ekonomi yang pada akhirnya ekonomi mengalami lesu menurun secara Nasional akibat COVID-19 (Hadiwardoyo, dkk, 2020:89). Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) menjelaskan perolehan PDB hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh dampak dari adanya kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat terhadap barang komoditas sehingga harga dan jumlah produksi barang dan jasa turut menurun serta adanya penerapan pembatasan aktivitas perdagangan ekspor impor.

Maka akibat adanya PSBB berdampak kepada perkantoran dan berbagai sektor industri dilarang beroperasi hanya Sebagian yang beroperasi itupun yang mencakup bahan pokok masyarakat banyak seperti Makanan, Medis, dan Internet ketiga kebutuhan tersebut tidak boleh berhenti beroperasi di tengah pandemi ini, Industri ini mengalami kerugian banyak karena Pandemi ini yang tidak dapat di prediksi dan dampak ini lah menimbulkan kerugian ekonomi secara menyeluruh perputaran ekonomi tidak berjalan lancar. Di tengah keadaan jumlah kasus COVID-19 yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah pemasukan sampai kesulitan membayar hutang atau kredit terhadap kreditur. (Luthfia, 2020)

COVID-19 yang kita alami bermasa ini menghasilkan dampak *economic shock*, yang memiliki pengaruh ekonomi secara menyeluruh baik dari perorangan, ekonomi keluarga, berbagai usaha mikro, kecil, menengah sekaligus besar semuanya sangat berdampak, bahkan dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara dengan berbagai skala yang mencakup dari lokal (dalam Indonesia), nasional, dan sampai kepada skala global/dunia. Penelitian Warwick McKibbin dan Roshen Fernando (Fernando *et.all*, 2020:2-3) menjelaskan COVID- 19 dapat sangat berdampak kepada ekonomi global/dunia untuk jangka pendek. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa analisis prediksi tersebut memperlihatkan berbagai biaya yang memungkinkan dapat terhindar dengan cara investasi yang lebih banyak terhadap sistem kesehatan masyarakat di seluruh dunia terlebih di beberapa negara yang berkembang dan memiliki populasi penduduk yang tinggi.

Banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat Pandemi ini selain Pemutusan Hubungan Kerja juga dirasakan oleh para pedagang, dan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Mengah (UMKM). Dalam sektor UMKM ini usaha yang aktif dan mandiri dalam

perekonomian karena tidak melibatkan Perusahaan sehingga terbilang Strategis. Di lingkup ASEAN, UMKM menghasilkan lapangan kerja antara 50% s.d. 95%, dan berkontribusi antara 30% s.d. 50% terhadap GDP (Islam, 2020:33). UMKM yang ada di Indonesia yaitu, UMKM yang usaha yang memiliki perorangan ini bisa mengurangi pengangguran. Orang yang tidak dapat pekerjaan di perusahaan ia bisa bekerja di UMKM sehingga UMKM ini perekonomian sangat penting dalam mengatasi pengangguran dan bisa menyerap tenaga kerja baik pekerjaan ringan hingga berat. UMKM ini tidak selalu mengalami kemajuan apalagi Usaha kecil yang sekarang sangat terdampak oleh Pandemi COVID-19, Usaha kecil dengan modal perorangan jika tidak berjalan baik sesuai fungsinya akan mengalami kemerosotan modal menghadapi banyak kendala untuk usaha itu tetap buka dan Sebagian usaha kecil ini banyak yang tutup. (Baker & Judge, 2020:1-2).

Terjadinya PHK di berbagai pekerjaan nya karena perusahaan tidak bisa memberikan gaji karena COVID menyebabkan mereka kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-sehari tidak adanya bantuan langsung dari pemerintah, PHK ini tidak terjadi selama PSBB saja bahkan ada perusahaan yang terpukul bangkrut tidak bisa bangkit Kembali akhirnya menjadi PHK tersebut permanen.

Dangan kondisi saat ini untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan serba sulit ini menyebabkan karakter manusia berubah. Banyak sebagian manusia yang tidak tahan dengan kondisi sulit mekakukan jalan pintas untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan ini masyarakat nekat untuk memiliki hutang, karena utang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang (Taneja, 2015:93-94). Apalagi di masa pandemi seperti ini kita berusaha untuk merasakan kebahagiaan meski sesungguhnya kebahagiaan yang di dapatkan hanya semu.

Dampak pandemi COVID-19 ini banyak terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) PHK ini terjadi secara serentak semenjak muncul nya COVID-19 dan mencatat rekor terbanyak pengurangan. Menurut survei tim kolaborasi P2K, Lembaga Demografi UI dan Kemenaker (Ngadi, 2020) memprediksikan dari bulan Agustus-September-Oktober 2020 akan mengalami peningkatan pengangguran hingga kurang lebih 25 juta yang didalamnya ada 10 juta pekerja mandiri dan 15 juta pekerja bebas menganggur. Menurut survei lain yang terkait kasus ini bahwa lebih banyak pekerja muda yang berusia dari 15-24 tahun yang sangat terdampak dalam pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Priatna (Priatna, 2015:4) pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan seseorang yang rendah. Pendapatan rendah akan secara berkelanjutan menyebabkan kemiskinan. Miskin berarti memiliki pendapatan yang lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak. Sedangkan menurut Muhadir Pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara yaitu jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Karena tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. (Muhadir, 2015:1-3)

Kasus Harian COVID-19 di Kabupaten Sumedang Cukup mengkhawatirkan, karena banyak kecamatan di Kabupaten Sumedang yang masyarakatnya terpapar COVID-19. Selain terpapar posisi COVID-19, banyak juga korban yang meninggal akibat terpapar COVID-19.

Gambar 1.1: Laporan kasus harian COVID-19, update 27 Juli 2021

NO	KECAMATAN	TOTAL TERKONFIRMASI	MENINGGAL	TERKONFIRMASI	KONTAK	SUSPEK
		MULAI 22 MARET 2020		AKTIF HARI INI	ERAT	
1	Buahdua	345	5	5		1
2	Cibugel	123	1			
3	Cimalaka	600	15	24	30	5
4	Cimanung	474	9	16	1	2
5	Cisarua	157	5	1		
6	Ciauta	114	8			
7	Conggeang	237	6	4		2
8	Darmaraja	255	13	9	5	4
9	Ganeas	249	6	16	8	2
10	Jatigede	132	5	1	2	
11	Jatinangor	326	9	17	9	1
12	Jatinunggal	143	7	11		1
13	Pamulihan	504	13	41	11	3
14	Paseh	220	9	5	26	2
15	Rancakalong	217	6	2		1
16	Siturna	351	14	6	20	2
17	Sukaresi	120	10	1		1
18	Sumedang Selatan	631	22	22	18	3
19	Sumedang Utara	1016	22	56	30	6
20	Surian	80	3	6	6	1
21	Tanjungkerta	385	8	14	6	
22	Tanjungmedar	124	3	1	25	
23	Tanjungsari	562	17	4	4	2
24	Tomo	273	5	1		
25	Ujungjaya	237	4	1		
26	Wado	174	6	9	16	3
JUMLAH		8049	234	273	217	42

Sumber: diskominfo_smd (Twitter.com)

Berdasarkan dari data laporan kasus harian COVID-19 bahwa seluruh wilayah di Kabupaten Sumedang melaporkan terjadinya kasus COVID-19 dan terdapat kasus meninggal akibat terpapar COVID-19 yang terkonfirmasi dari 22 Maret 2020 sampai 27 Juli 2021. Dari data tersebut diketahui bahwa Kecamatan Sumedang Utara menjadi jumlah terbanyak yang terpapar COVID-19 dan kasus meninggal terbanyak, yang dimana Kelurahan Talun tersebut terletak di Kecamatan Sumedang Utara.

Akibat dari pandemi ini dan kebijakan yang di terapkan di Kabupaten Sumedang berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada tahun 2020 dilaporkan telah mengalami penurunan hingga 20 persen. Kondisi itu diakibatkan tidak berjalannya roda perekonomian di wilayah Kabupaten Sumedang secara maksimal imbas pandemi COVID-19 yang sebelumnya menerapkan kebijakan PSBB untuk menurunkan kasus yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dikutip dari situs berita daring kompas.com "Yang jelas pendapatan daerah tentunya ada penurunan hingga 20 persen, kemudian adanya pandemi COVID-19 ini beberapa kegiatan tidak bebas, sehingga berdampak pada roda ekonomi"

kata Dony saat ditemui di Gedung Negara, Kamis (27/8/2020).
(<https://regional.kompas.com/read/2020/12/30/15440411/angka-pengangguran-dan-kemiskinan-di-sumedang-naik-akibat-pandemi?page=all>, Diakses pada 4 April 2021)

Dilihat dari penurunan nilai PAD Kabupaten Sumedang yang di terima oleh pemerintah setempat sehingga jelas bahwa pandemi COVID-19 berdampak besar diberbagai lini sektor ekonomi, dari hal tersebut mengakibatkan menyumbang angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang yang semakin besar. Dikutip dari situs berita daring pikiran-rakyat.com "Situasi itu secara langsung telah berkontribusi terhadap terjadinya peningkatan angka kemiskinan di Sumedang. Yang semula data kemiskinan di Sumedang berjumlah 132.000 kepala keluarga (KK). Dan setelah pandemi COVID-19 bertambah jadi 180.000 KK," kata Bupati Sumedang Dr.H.Dony Ahmad Munir, Senin 2 November 2020 (<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-35900530/dampak-pandemi-COVID-19-angka-kemiskinan-baru-di-sumedang-bertambah> Diakses pada 4 April 2021).

Dilihat dari kutipan berita daring tersebut menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah data masyarakat miskin tersebut yang merupakan kategori miskin baru, hal ini terjadi akibat hilangnya mata pencaharian warga selama masa pandemi dengan di terapkannya aturan PSBB. Selain tingkat kemiskinan yang terjadi menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang, naik akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini. Dikutip dari berita daring kompas.com "Angka kemiskinan memang mengalami kenaikan tapi masih pada ambang batas, yaitu ada di angka 10 persen. Untuk angka pengangguran memang naik cukup signifikan akibat Pandemi pada 2020 ini," ujar Dony usai jumpa pers Refleksi dan Resolusi Akhir Tahun 2020 di Gedung Negara, Sumedang, Rabu (30/12/2020).
(<https://regional.kompas.com/read/2020/12/30/15440411/angka-pengangguran-dan-kemiskinan-di-sumedang-naik-akibat-pandemi?page=all> Diakses pada 4 April 2021).

Akibat dari masalah ekonomi ini yang diakibatkan dari pandemi COVID-19 yang berakibat banyaknya pengangguran baru dan banyak orang yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat membuat sebagian warga mengalami kesulitan ekonomi.

Dikutip dari situs berita dari jabarekspres.com “Tak tanggung-tanggung, keluhan mereka pun turut membanjiri kolom komentar medsos resmi milik Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Seperti yang diadukan seorang netizen dengan akun @nengthania_ pada akun Instagram pribadi Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, @dony_ahmad_munir “Pa pami ngaluarkeun kebijakan ppkm tolong dipikirkan juga masalah hutang masyarakatnya.” tulis Neng Thania. Namun, hingga kemarin belum ada tanggapan dari admin akun Instagram bupati terkait aduan warga tersebut, (18/07/2021)”

(<https://jabarekspres.com/berita/2021/07/18/usaha-sulit-bank-emok-malah-gentayangan-nagih-hutang/2/> Diakses pada 15 Agustus 2021).

Dikutip dari berbagai media daring yang selaras dengan berbagai permasalahan di Kabupaten Sumedang, pada intinya bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini berdampak besar terhadap roda ekonomi Sumedang. Dengan hal tersebut banyak orang yang kehilangan pendapatannya, namun kebutuhan ekonomi harus tetap berjalan.

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan beberapa perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa membayar utang-utangnya dan kondisi keuangannya sangat melemah. Ada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan perlindungan hukum melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Kartini Mulyadi, PKPU merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang

dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. (Mulyadi, 28:1999).

Kelurahan Talun merupakan salah satu wilayah kelurahan yang ada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Masyarakat yang tinggal di kelurahan Talun tidak lepas dari masalah ekonomi. Ketika sebelum terjadinya pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha yang memiliki toko fisik mengeluh mengenai daya beli masyarakat yang menurun dari tahun – tahun sebelumnya. Ditambah saat ketika terjadinya pandemi banyak masyarakat yang tidak diperbolehkan keluar rumah, dan hal itu yang menambah berkurangnya daya beli masyarakat untuk berbelanja. Pendapatan pemilik toko dan tidak segan – segan untuk merumahkan pegawainya untuk mengefesiensikan biaya operasional usaha.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan di atas dari paparan umum tentang masalah tersebut hingga ke khusus mengenai permasalahan hutang piutang tinggi di tengah masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat Kelurahan Talun pada masa pandemi COVID-19. Sehingga penulis tertarik mengambil judul **“TINGGINYA ANGKA HUTANG PIUTANG PASCA PANDEMI COVID-19 (Studi kasus masyarakat Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa dampak negatif di masyarakat akibat COVID-19.
2. Terjadi masalah ekonomi di masyarakat akibat pandemi COVID-19.
3. Adanya masalah kebijakan dalam penanganan pandemi COVID-19 sehingga menimbulkan kontribusi peningkatan hutang piutang.
4. Peningkatan hutang piutang yang terjadi di masa pandemi COVID-19.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, fenomena yang ada, dan identifikasi masalah yang telah penulis rumuskan, maka penulis menarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat ekonomi masyarakat Kel. Talun, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sebelum dan sesudah pandemi COVID-19?
2. Bagaimana tingkat hutang piutang masyarakat Kelurahan. Talun, Kecamatan. Sumedang Utara, Kabupaten. Sumedang?
3. Bagaimana tingginya hitang piutang akibat penurunan ekonomi pada masa COVID-19?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, maka penulis menarik tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat ekonomi masyarakat Kel. Talun, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui tingkat hutang piutang masyarakat Kelurahan. Talun, Kecamatan. Sumedang Utara, Kabupaten. Sumedang.
3. Untuk mengetahui tingginya hitang piutang akibat penurunan ekonomi pada masa COVID-19.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk memberikan manfaat positif untuk orang yang membaca penelitian yang saya tulis ini diantaranya yaitu sebagai berikut :

A Kegunaan Secara Akademis.

Penelitian ini diharapkan untuk berguna bagi orang banyak dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan melihat suatu permasalahan penelitian saya yang berjudul Tingginya Angka Hutang Piutang Pasca Pandemi COVID-19 (Studi kasus masyarakat Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang). Penelitian ini bisa memberikan informasi, berita dan perhatian kita semua dalam rangka pemecahan masalah sengketa hutang piutang ini secara cepat dan tepat.

B. Kegunaan Secara Praktis.

Secara Praktis Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hutang piutang di masyarakat meningkat akibat dari kebijakan yang dikeluarkan atas dasar pandemi COVID-19 ini. Karena sebelum pandemi ini terjadi banyak masyarakat yang memiliki hutang kepada kreditur yang digunakan baik untuk modal usaha maupun untuk membiayai gaya hidupnya. Namun sebelum terjadinya pandemi banyak yang sanggup membayar hutangnya karena mereka memiliki pendapatan yang stabil, namun saat pandemi seperti ini pendapatan mereka terhambat bahkan hilang, sampai masyarakat rela mencari hutangan baru untuk menyambung kehidupannya.

Dengan itu, penulis pengangkat penelitian ini, maka masalah itu harus dipecahkan secara bersamaan dan dilakukan secara kompak antara rakyat dan pemerintah selain itu bisa memberikan beberapa perubahan yang positif yang berkaitan dengan Tingginya Angka Hutang Piutang Pasca Pandemi COVID-19 . Dan juga dapat bermanfaat bagi kalangan

mahasiswa-mahasiswi UIN sebagai referensi untuk membuat bahan diskusi, proposal dan skripsi terutama yang berkenaan dengan masalah tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ekonomi, manusia tidak bisa terlepas dari tatanan perekonomian. Selain makhluk ekonomi juga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selalu berkaitan dengan kondisi tubuh untuk bertahan hidup, jika manusia terlepas dari ekonomi gaya hidup/penampilan aktivitasnya tentu tidak bisa. Manusia makhluk Sosial-Ekonomi selalu mengejar materi kebutuhan nya agar dapat menyambung hidup. Masalah ekonomi ini selalu terjadi tetapi sikap kita adalah menghadapinya dan berjuang untuk mengelola alam dengan material di bumi ini.

Maka dengan itu masyarakat harus sama-sama berjuang bangkit dari masalah keterpurukan ekonomi ini dengan cara menunjukkan perubahan eksternal bertujuan kehidupan agar terus berjalan. Ken Budha Kusumandaru (2004:65) mengemukakan dengan buku Karl Marx yang berjudul revolusi dan sosialisme, tujuan utama manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Fakta ini benar terjadi pada perkembangan manusia dari mulai akarnya memang manusia selalu memenuhi kebutuhannya. Selalu berusaha sekuat tenaga dari fisik maupun mental selain fisik mereka mengusahakan nya dari masing individual atau kelompok yang terbentuk. Rantai Dialektika kehidupan selalu diawali dengan suatu hak bersifat fisik atau material. Setiap manusia memiliki perut yang harus di isi makanan/minuman, apabila perut lapar kecerdasan, konsentrasi dan tenaga pun akan sangat terganggu sehingga sel-sel syaraf tidak berfungsi dengan baik maka dari itu sangat perlu untuk mengisi perut lapar dengan berbagai cara baru untuk mengatasi perut lapar.

Seseorang memerlukan kredit untuk memenuhi kebutuhannya sebab manusia adalah Homo economicus (Suyatno, dkk, 2007:52-55). Kebutuhannya selalu beragam dan selalu

meningkat namun kemampuan untuk memenuhinya terbatas. Dalam konsep ekonomi yang dikemukakan Setyowati, Damayanti, Subagyo, Badrudin, Suryawati, Algifari, Subiyakto, Fatmawati dan Purnamawati (2003) ada istilah kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut dalam bentuk permodalan yang disebut kredit.

Upaya pemenuhan kebutuhan manusia terkait dengan produksi, konsumsi dan distribusi sehingga ada kepentingan dari pihak produsen, konsumen juga pemerintah. Hutang membentuk keseimbangan antara tiga kepentingan yakni kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat (rakyat) dan kepentingan pemilik modal (pengusaha). Penyaluran kredit konsumsi juga diperlukan agar membantu meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi. Penyaluran kredit terhadap konsumen dapat meningkatkan daya beli masyarakat (Ludvigson, 1999:422).

Pandemi COVID-19 ini telah merugikan banyak pihak semua berusaha bangkit dalam perekonomian. Saat pandemi ini tingkat pengangguran semakin banyak karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kehilangan mata pencaharian nya membuat masyarakat sangat terpuak, UMKM yang ada di tengah masyarakat mengalami kemerostan tidak berjalan lancar seperti sebelum adanya pandemi ini, dan banyak para narapida yang mendapatkan kebebasan asimilasi oleh aparat hukum tetapi asimilasi tersebut malah berdampak pada keseimbangan social. Dengan banyaknya fenomena ini tentu krisis di Indonesia kian hari kian memburuk,krisis terjadi karena sistem social tidak berjalan dengan baik sehingga terus menerus berlarut pada keterpurukan sehingga sistem sosial di masyarakat tidak seimbang. Pada akhirnya muncullah perdebatan Pro dan Kontra di tengah masyarakat, penyakit social pada fenomena yang kita hadapi. Penyimpangan social makin merajela di tengah masyarakat seperti kemiskinan ini dampak dari pengangguran,k ejahatan menghalalkan segala cara, kasus

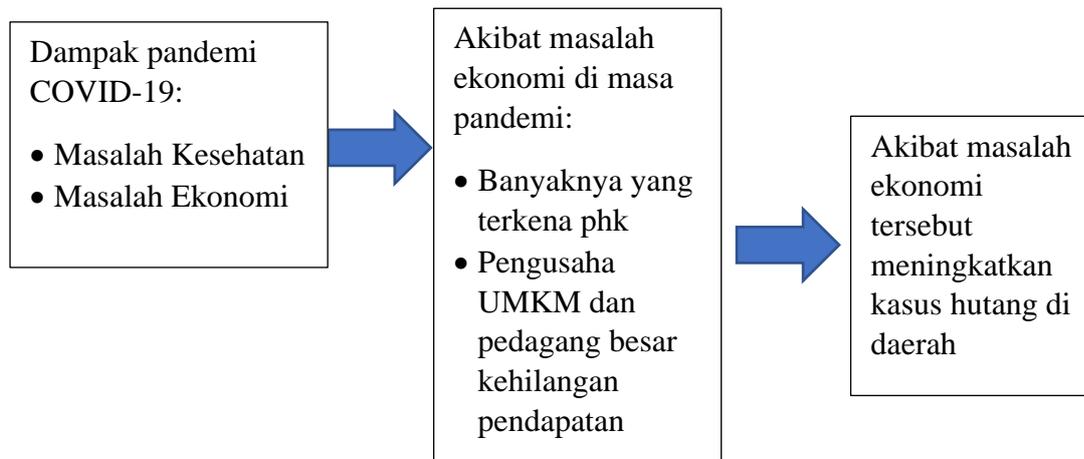
sengketa hutang piutang di masyarakat tidak terkendali semua termasuk penyakit social karena sistem social tidak berjalan dengan baik sesuai fungsinya.

Kebutuhan makin hari makin banyak tidak bisa dibendung dan pekerjaan pun sama tidak terpenuhi maka dalam kondisi mendesak ini akhirnya melakukan peminjaman uang untuk memenuhi kebutuhannya yang pada akhirnya mengalami kendala yaitu sulit melunasi hutang tersebut. Persoalan ekonomi merupakan sebuah faktor yang kerap kali menghantui dalam kehidupan keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kebutuhan yang tinggi dalam menjalani kehidupan sosial sehingga tidak bisa mengontrol keadaan ekonomi dengan baik.

Jika keuangan dalam ekonomi keluarga dikelola dengan tidak baik maka kebutuhan financial keluarga tidak akan terpenuhi dan akan mengalami berbagai hambatan terhadap faktor lain, seperti tekanan spritual, mental, emosional, sosial dan yang lainnya. Dari berbagai faktor tersebut, untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga maka dilakukan dengan cara berhutang untuk mendapatkan modal usaha dengan tujuan memperbaiki ekonomi dalam keluarga. (Syaparuddin. 2014:76-91)

Pada saat wabah COVID-19 ini pengangguran semakin bertambah, pengangguran adalah hal buruk tidak semua orang mau mengalaminya karena ini bisa berdampak pada kehidupan Individu, kelompok dan Masyarakat luas. Banyaknya hutang piutang menyebabkan merendahnya tingkat kehidupan, tatanan di keluarga menjadi rusak karena suatu pekerjaan ialah sumber utama dan sangat penting. Pengangguran ini bisa saja makin meluas apabila sampai memperparah meluas tidak bisa dibendung menyebabkan kekacauan Politik serta ketidaknyamanan tinggal di tengah masyarakat tersebut.

Gambar 1.2: Paradigma Pemikiran



Dengan sekema diatas dipahami adanya hubungan Dampak pandemi COVID-19 sehingga terjadi beberapa akibat masalah ekonomi yang menyebabkan meningkatnya kasus sengketa hutang piutang di kalangan masyarakat kerana pendapatannya secara mendadak harus berkurang bahkan hilang yang sebelumnya mampu untuk mengangsur cicilannya.